

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BPR MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN BPR MILIK SWASTA DI PROVINSI BALI PERIODE 2019-2021

Ni Putu Sinta Kharisma Dewi¹ dan I Gede Agus Pertama Yudantara²

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ¹| sinta.kharisma@undiksha.ac.id, ²| agus.yudantara@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta yang ditinjau dari berbagai rasio keuangan yang tercantum dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif komparatif. Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Independent Sample T-Test* atau Mann Whitney U yang disesuaikan dengan pemenuhan syarat normalitas dan homogenitas yang diolah dengan bantuan program pengolahan data *SPSS 26.0 for Windows*. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio LDR dan CR, sedangkan dari rasio lainnya seperti rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, dan BOPO tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta.

Kata Kunci : kinerja keuangan, BPR, rasio keuangan

Abstract

This research aims to compare the financial performance between Regional Government-Owned BPRs and Private BPRs in terms of the various financial ratios listed in POJK Number 48/POJK.03/2017 concerning Transparency of Rural Bank Financial Conditions. The type of research used is quantitative research with a comparative descriptive research design. The data analysis method used in this research is Independent Sample T-Test or Mann Whitney U which is adjusted to meet the requirements of normality and homogeneity which is processed with the help of the SPSS 26.0 for Windows data processing program. The results of this study are that there are differences in financial performance between Regional Government Owned BPRs and Private BPRs in terms of LDR and CR ratios, while from other ratios such as KPMM, PPAP, NPL, ROA, and BOPO ratios there is no difference in financial performance between Regional Government Owned BPRs. with Private Owned BPR.

Keywords : financial performance, BPR, financial ratio

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pada sektor perbankan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap penurunan kinerja keuangan perbankan tak terkecuali BPR. Secara umum, kondisi BPR selama pandemi Covid-19 harus menghadapi risiko kenaikan NPL dan rentabilitas yang menurun. Oleh karena BPR memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena menurut Yuniarti (2011) permodalan, sumber daya, serta sistem pengelolaan BPR belum sebaik bank umum, sehingga sangat berisiko saat menghadapi situasi krisis seperti pandemi ini. Maka dari itu, BPR harus mendapatkan perhatian khusus agar mampu mempertahankan fungsi dan kinerjanya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan BPR sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, BPR dibedakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah (biasanya Pemerintah Daerah Tingkat I atau Tingkat II) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik swasta. Pada dasarnya kedua jenis BPR tersebut melaksanakan kegiatan yang sama, namun BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan jenis BPR lainnya karena selain menjalankan kegiatan BPR secara umum, juga berfungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah dengan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program pemerintah daerah.

Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki populasi BPR yang banyak dibandingkan daerah Indonesia lainnya selain pulau Jawa. Sesuai data per Januari tahun 2019, terdapat 136 BPR yang terdiri dari 133 BPR Milik Swasta dan 3 BPR Milik Pemerintah Daerah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Banyaknya jumlah BPR akan mendorong persaingan yang ketat antar BPR dalam menarik nasabah. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, meningkatkan kinerja keuangan merupakan sebuah keharusan agar tetap bertahan dalam industri perbankan di Indonesia. Namun data di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Kinerja keuangan dari masing-masing perbankan merupakan cerminan dari kemampuan bank tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya (Wanma & Anggarini, 2019). Oleh karena itu, Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. dalam kaitannya dengan teori *signaling*, informasi-informasi dalam laporan keuangan merupakan sinyal perusahaan kepada *stakeholder* yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. (Dewi, 2017). Hasil penilaian kinerja keuangan yang baik menunjukkan sinyal baik (*good news*) sehingga masyarakat akan tertarik untuk terus memanfaatkan jasa dari BPR tersebut. Sebaliknya, hasil penilaian kinerja keuangan yang buruk menunjukkan sinyal buruk (*bad news*) sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada BPR dalam memanfaatkan jasanya..

Penilaian kinerja keuangan sering dilakukan dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan bahwa rasio keuangan yang dijadikan sebagai pedoman penilaian kinerja keuangan terdiri dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non Performing Loans* (NPL), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Return On Asset* (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Cash Ratio* (CR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini juga mewakili lima indikator penilaian kinerja keuangan yang disebutkan oleh Cornett et al., (2012) yang menyatakan setidaknya ada lima indikator keuangan yang digunakan sebagai proksi kinerja keuangan bank meliputi profitabilitas, kualitas aset, risiko likuiditas, efisiensi operasional, serta risiko modal.

Penelitian (Afriyanto et al., 2016) yang membandingkan kinerja keuangan dengan rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, CR, dan LDR, hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian (Tiarso & Idayati, 2017) yang menunjukkan bahwa dari rasio NPL, NPM dan ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah dan Bank milik swasta, sedangkan untuk CAR, BOPO dan LDR membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan Bank milik pemerintah dan Bank milik swasta

KPMM atau istilah lainnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Rositasari (2016) bank yang dimiliki oleh pemerintah memiliki sumber pendanaan yang relatif lebih besar dibandingkan bank yang dimiliki swasta. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₁ : Terdapat perbedaan kinerja

keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio KPMM.

Rasio PPAP adalah cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin terjadi akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif dengan membebaskan laba rugi tahun berjalan (Priatna, 2016). Rasio PPAP berkaitan dengan laba yang diperoleh sebuah bank, akan tetapi BPR Milik Pemerintah Daerah tidak murni berorientasi pada profit, berbeda halnya dengan BPR Milik Swasta. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₂ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio PPAP.

Riyadi (2004) mendefinisikan rasio NPL sebagai perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan total kredit yang termasuk kolektibilitas bermasalah. Tingkat NPL antar bank bisa berbeda sesuai dengan bagaimana manajemen bank tersebut dalam mengelola kredit bermasalahnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₃ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio NPL.

Rasio ROA merupakan rasio yang digunakan mengukur kemampuan manajemen BPR dalam memperoleh keuntungan bersih dari aset yang dimiliki dengan membagi laba bersih dengan total aset (Sukamulya, 2017). BPR Milik Pemerintah Daerah sifat usahanya mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan ekonomi belaka, hal ini berbeda dengan BPR Milik Swasta yang murni berorientasi pada profit. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₄ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio ROA.

Rasio BOPO adalah perbandingan antara beban operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh untuk menunjukkan tingkat efisiensi bank. Terdapat perbedaan orientasi usaha antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta, sehingga hal ini berpotensi menyebabkan perbedaan pula pada upaya menjaga tingkat efisiensi operasionalnya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₅ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio BOPO.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dengan membandingkan kredit dengan dana pihak ketiga. BPR Milik Pemerintah Daerah berpeluang mendapatkan DPK lebih besar yaitu dari pemerintah daerah dan nasabah dibandingkan BPR Milik Swasta yang hanya dari nasabah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₆ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio LDR.

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid. Perbedaan Dana Pihak Ketiga yang dimiliki antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta juga berpengaruh terhadap kas dan setara kas yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut :

H₇ : Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio CR.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Subjek pada penelitian ini adalah BPR yang berkedudukan di Provinsi Bali selama periode 2019-2021, sedangkan yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan periode 2019-2021 yang bisa diakses melalui situs resmi OJK. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh BPR yang berkedudukan di provinsi Bali per tahun 2019 berjumlah 136 BPR, yang terdiri dari 133 BPR yang dimiliki oleh Swasta dan 3 BPR milik Pemerintah Daerah. Sedangkan sampel yang digunakan adalah keseluruhan BPR Milik Pemerintah Daerah yang berjumlah 3 BPR, dan 45 BPR Milik Swasta yang diperoleh dengan

menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan beberapa kriteria perolehan sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan pada data sekunder berupa rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan milik BPR dalam rentang tahun 2019-2021. Dari data yang diperoleh, akan dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum dari data yang diperoleh, uji prasyarat analisis (uji normalitas dan uji homogenitas) untuk menentukan uji beda menggunakan uji statistik parametrik atau uji statistik non parametrik, serta uji *Independent Sample T-Test* jika data yang diperoleh memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sedangkan jika tidak memenuhi kedua asumsi tersebut, digunakan alternative uji non parametrik *Mann Whitney U*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Untuk memperoleh deskripsi umum dari data yang diperoleh, maka dilakukan uji statistik deskriptif yang diukur dengan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*maximum*), nilai minimum (*minimum*), dan standar deviasi (*Std. Deviation*). Hasil uji statistik deskriptif untuk data rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Rasio	Kelompok	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
KPMM	BPR Milik Pemda	26,76	24,14	30,74	3,50
	BPR Milik Swasta	31,78	13,80	155,55	22,00
PPAP	BPR Milik Pemda	100,00	100,00	100,00	0,00
	BPR Milik Swasta	101,96	77,69	192,93	14,96
NPL	BPR Milik Pemda	8,01	4,15	15,49	6,48
	BPR Milik Swasta	12,28	2,30	51,77	8,45
ROA	BPR Milik Pemda	0,25	-3,19	2,48	3,02
	BPR Milik Swasta	1,03	-6,83	7,78	2,61
BOPO	BPR Milik Pemda	93,35	77,80	122,97	25,66
	BPR Milik Swasta	94,64	48,61	165,36	20,98
LDR	BPR Milik Pemda	58,39	48,13	76,32	15,58
	BPR Milik Swasta	77,12	51,11	97,82	8,59
CR	BPR Milik Pemda	25,53	18,51	34,68	8,29
	BPR Milik Swasta	17,22	9,40	33,88	6,02

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif dari rata-rata keseluruhan rasio KPMM BPR Milik Pemerintah Daerah sebesar 26,76%, sedangkan rata-rata rasio KPMM BPR Milik Swasta adalah 31,78%. Bank Indonesia lewat PBI Nomor 6/10/PBI/2004 mensyaratkan setiap bank harus memenuhi rasio KPMM di atas 8% untuk bisa dinyatakan sehat. Berdasarkan nilai *mean* yang diperoleh, maka baik BPR Milik Pemerintah Daerah maupun BPR Milik Swasta sama-sama dalam kondisi yang sehat karena rata-rata rasio keduanya lebih dari 8%.

Berdasarkan rasio PPAP, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan rata-rata rasio PPAP dari BPR Milik Pemerintah Daerah adalah 100,00%, sedangkan rata-rata rasio PPAP dari BPR Milik Swasta adalah 101,96%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004, setiap bank wajib membentuk cadangan berupa PPAP di

atas 81%. Jadi berdasarkan nilai *mean* yang didapatkan, BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta sama-sama dalam kondisi sehat.

Hasil analisis statistik deskriptif pada rasio NPL, BPR Milik Pemerintah Daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8,01% dan 12,28% pada BPR Milik Swasta. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada PBI Nomor 6/10/PBI/2004, bank harus menjaga rasio NPL-nya pada angka 5% untuk bisa dikatakan sehat.

Untuk rasio ROA, rata-rata yang dihasilkan untuk BPR Milik Pemerintah Daerah adalah 0,25% dan 1,03% untuk BPR Milik Swasta . Oleh karena itu, berdasarkan nilai *mean* yang diperoleh, BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta sama-sama berada pada kondisi yang tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut BPR Milik Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang tidak sehat karena rata-rata-rasio ROA < 0,675, sedangkan BPR Milik Swasta berada pada kondisi yang cukup sehat karena rata-rata rasio ROA pada periode 2019-2021 berada pada rentangan 0,999%-1,215%.

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada rasio BOPO, diperoleh rata-rata untuk BPR Milik Pemerintah Daerah sebesar 93,35% dan untuk BPR Milik Swasta 94,64%. Sesuai dengan ketetapan dari Bank Indonesia PBI Nomor 6/10/PBI/2004, bank yang sehat adalah bank yang memiliki rasio BOPO di bawah 93,52%. Oleh karena itu, berdasarkan nilai *mean* dari kedua kelompok BPR yang diteliti, menunjukkan bahwa pada periode 2019-2021, BPR Milik Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang sehat, namun BPR Milik Swasta berada pada kondisi yang cukup sehat karena masih berada pada rentangan 93,52%-94,72%.

Hasil uji statistik deskriptif pada rasio LDR menghasilkan nilai rata-rata pada BPR Milik Pemerintah Daerah sebesar 58,39% dan pada BPR Milik Swasta sebesar 77,12%. Oleh karena itu, berdasarkan nilai *mean* yang didapatkan, pada periode 2019-2021 BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta berada pada kondisi yang sehat.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada rasio CR, BPR Milik Pemerintah Daerah memperoleh rata-rata sebesar 25,53% sedangkan BPR Milik Swasta memperoleh rata-rata 17,22%. Oleh karena itu, berdasarkan nilai *mean* yang diperoleh, baik BPR Milik Pemerintah Daerah maupun BPR Milik Swasta sama-sama memiliki kondisi yang sehat pada periode 2019-2021.

Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Sebelum menentukan akan menggunakan uji hipotesis dengan uji statistik parametrik atau non parametrik, maka diperlukan uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas (Usmadi, 2020). Berikut adalah hasil uji normalitas dengan *Kolmogrov Smirnov* dan uji homogenitas dengan uji *Levene's*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas

Variabel	N	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Levene's Test	
		Asymp.Sig	Keterangan	Asymp.Sig	Keterangan
KPMM	46	0,000	Tidak Normal	0,266	Homogen
PPAP	46	0,000	Tidak Normal	0,551	Homogen
NPL	46	0,082	Normal	0,844	Homogen
ROA	46	0,025	Tidak Normal	0,624	Homogen
BOPO	46	0,163	Normal	0,549	Homogen
LDR	46	0,006	Tidak Normal	0,106	Homogen
CR	46	0,001	Tidak Normal	0,117	Homogen

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas pada tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel yang berdistribusi normal adalah rasio NPL dan BOPO karena memperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05, sedangkan untuk rasio KPMM, PPAP, ROA, LDR,

dan CR tidak berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Oleh karena itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan pada rasio NPL dan BOPO antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta menggunakan uji statistik parametrik (*Independent Sample T-Test*) karena telah memenuhi asumsi normalitas. Namun, sebaliknya pada variabel yang tidak berdistribusi normal meliputi rasio KPMM, PPAP, ROA, LDR, dan CR maka untuk menguji apakah terdapat perbedaan atau tidak antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta, digunakan uji statistik non parametrik (*Mann Whitney U*) karena tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Beda

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta berdasarkan rasio-rasio yang telah disebutkan sebelumnya, digunakan uji statistik parametrik *Independent Sample T-Test* dan uji statistik non parametrik *Mann Whitney U* sehingga memperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Beda dengan *Independent Sampe T-Test* dan *Mann Whitney U*

<i>Independent Sample T-Test</i>			
Rasio	Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keputusan
NPL	0,397	0,05	H ₀ diterima, H ₃ ditolak
BOPO	0,919	0,05	H ₀ diterima, H ₅ ditolak
<i>Mann Whitney U</i>			
Rasio	Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keputusan
KPMM	0,640	0,05	H ₀ diterima, H ₁ ditolak
PPAP	0,656	0,05	H ₀ diterima, H ₂ ditolak
ROA	0,947	0,05	H ₀ diterima, H ₄ ditolak
LDR	0,035	0,05	H ₀ ditolak, H ₆ diterima
CR	0,043	0,05	H ₀ ditolak, H ₇ diterima

Sumber: Data diolah dengan SPSS (2022)

Hasil pengujian hipotesis pertama tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio KPMM yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,640 atau lebih dari 0,05 yang berarti H₁ ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio KPMM.

Hasil pengujian hipotesis kedua tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio PPAP yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,656 atau lebih dari 0,05 yang berarti H₂ ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio PPAP.

Hasil pengujian hipotesis ketiga tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio NPL yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,397 atau lebih dari 0,05 yang berarti H₃ ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio NPL.

Hasil pengujian hipotesis keempat tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio ROA yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,947 atau lebih dari 0,05 yang berarti H₄ ditolak atau artinya tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio ROA.

Hasil pengujian hipotesis kelima tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio BOPO yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,919 atau lebih dari 0,05 yang berarti H₅ ditolak atau artinya

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio BOPO.

Hasil pengujian hipotesis keenam tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio LDR yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,035 atau kurang dari 0,05 yang berarti H_6 diterima atau artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio LDR.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh tentang perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio CR yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi 0,043 atau kurang dari 0,05 yang berarti H_7 diterima atau artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta dari segi rasio CR.

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio KPMM

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank. Berdasarkan uji beda dengan alat uji *Mann Whitney U* yang disajikan pada tabel 3, diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelompok BPR tersebut memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dalam memenuhi modal minimumnya.

Tidak adanya perbedaan rasio KPMM antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta didorong oleh komitmen yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak yang mengawasi lembaga keuangan di Indonesia dalam mengawasi kemampuan permodalan BPR di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya POJK No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan Modal Inti Minimum. Di dalam POJK tersebut, dinyatakan bahwa setiap BPR wajib menyediakan modal minimum sekurang-kurangnya 8% dan bagi BPR yang tidak mampu menjaga jumlah modal minimumnya akan dikenakan sanksi administratif dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (*merger*) atau peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal ini BPR. Oleh karena itu, setiap BPR akan dituntut untuk memenuhi ketentuan tersebut agar bisa terus beroperasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Afriyanto et al., 2016) dan (Prananta et al., 2019) yang sama-sama membandingkan kinerja keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta di Provinsi Riau dan Jawa Tengah. Sedangkan hasil sebaliknya terdapat pada penelitian (Tiarso & Idayati, 2017), (Widiyaningsih & Suwasono, 2020) dan (Faroza & Susanti, 2021).

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio PPAP

Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. Berdasarkan uji beda dengan uji *Mann Whitney U* yang disajikan pada tabel 3, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio PPAP. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelompok BPR tersebut memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dalam menyisihkan penghapusan aktiva produktif.

Tidak adanya perbedaan rasio PPAP antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ini didorong oleh ketetapan OJK yang telah dibuat tentang jumlah minimum PPAP yang harus dibentuk. Ketentuan ini dituangkan dalam POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Di dalam POJK tersebut disebutkan bahwa BPR wajib membentuk PPAP yang terdiri dari PPAP Umum yang persentasenya telah ditetapkan. Berdasarkan ketetapan

tersebut maka setiap BPR harus memenuhi ketentuan tersebut untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afriyanto et al., (2016) dan Widiarto & Jamli (2006) yang juga meneliti perbedaan kinerja keuangan anatar BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta dan hasilnya tidak ada perbedaan kinerja keuangan dari rasio PPAP antara kedua kelompok BPR tersebut.

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio NPL

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan total kredit yang terdapat pada bank. Berdasarkan uji beda dengan *Independent Sample T-Test* yang disajikan pada tabel 3, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio NPL. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok BPR tersebut memiliki tingkat kredit bermasalah yang tidak jauh berbeda. Tidak adanya perbedaan rasio NPL antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta didorong oleh situasi pandemi Covid-19, dimana semua lembaga perbankan menghadapi permasalahan dan risiko kredit yang sama akibat pelemahan ekonomi secara global yang membuat kemampuan masyarakat dalam membayar kredit juga ikut menurun. Secara lebih mengkhhusus, kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh pemerintah pada awalnya memang bertujuan untuk menekan lonjakan NPL, namun bukan tidak mungkin jika kredit-kredit yang telah direstrukturisasi berpotensi menjadi NPL nantinya, sehingga BPR harus cermat dalam menentukan siapa saja yang layak untuk memanfaatkan kebijakan restrukturisasi kredit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afriyanto et al., (2016) Tiarso & Idayati, (2017) Mointi (2019) dan Faroza & Susanti, (2021) yang menunjukkan tidak ada perbedaan NPL antara bank milik pemerintah dengan bank milik swasta. Namun, penelitian (Prananta et al., (2019) dan Widiyaningsih & Suwasono (2020) menunjukkan hasil sebaliknya.

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio ROA

Rasio Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan mengukur kemampuan manajemen BPR dalam memperoleh keuntungan bersih dari aset yang dimiliki dengan membagi laba bersih dengan total aset (Sukamulya, 2017). Berdasarkan uji beda dengan *Mann Whitney U* yang disajikan pada tabel 3, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio ROA.

Tidak adanya perbedaan rasio ROA antara BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta juga turut dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2019-2021. Sesuai dengan Laporan Publikasi Industri Perbankan yang diterbitkan oleh OJK selama tahun 2019-2021, salah satu tantangan yang harus dihadapi BPR dalam situasi pandemi ini adalah penurunan rentabilitas yang dicerminkan dengan penurunan rasio ROA. Penurunan rentabilitas ini dilatarbelakangi oleh kenaikan jumlah kredit bermasalah yang menyebabkan penurunan penghasilan dari bunga kredit yang merupakan sumber penghasilan utama pada bank.

Hasil penelitian yang menyatakan tidak ada perbedaan kinerja keuangan dari rasio ROA antara BPR Milik Pemerintah dengan BPR Milik Swasta juga diperoleh pada penelitian Afriyanto et al. (2016) dan Prananta et al., (2019). Sedangkan penelitian Mointi, (2019) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan antara rasio ROA bank pemerintah dengan bank swasta.

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio BOPO

Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi operasional yang dilakukan oleh bank dengan

membandingkan beban operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diterima selama periode tertentu. Berdasarkan uji beda dengan *Independent Sample T-Test* pada tabel 3, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta.

Pada BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta, kenaikan rasio BOPO didorong oleh penurunan pendapatan bunga kredit sebagai pendapatan operasional utama BPR akibat pandemi Covid-19, sedangkan BPR harus tetap mengeluarkan beban operasional untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto et al. (2016) dan Prananta et al., (2019) yang menyatakan tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio BOPO. Sedangkan penelitian Mointi, (2019) dan Tiarso & Idayati (2017) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan antara rasio ROA bank pemerintah dengan bank swasta.

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio LDR

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uji beda dengan *Mann Whitney U* yang dapat dilihat pada tabel 3, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah daerah dengan BPR Milik swasta ditinjau dari rasio LDR. Perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta dari segi rasio LDR ini didorong oleh perbedaan karakteristik antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta, dimana BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki peluang perolehan dana pihak ketiga yang lebih besar karena tidak hanya berasal dari nasabah, juga bisa berasal dari pemerintah daerah. Hal ini disebutkan dalam Permendagri Nomor 94 Tahun 2017

Hasil penelitian serupa terdapat pada penelitian Tiarso & Idayati (2017) dan Mointi (2019) yang menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank pemerintah dengan bank swasta ditinjau dari rasio LDR. Sedangkan pada penelitian (Afriyanto et al., 2016) dan (Prananta et al., 2019) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu tidak ada perbedaan rasio LDR antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta.

Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio CR

Cash Ratio (CR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid seperti kas dan setara kas. Berdasarkan uji beda dengan *Mann Whitney U* yang disajikan pada tabel 3, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah daerah dengan BPR Milik swasta ditinjau dari rasio CR.

Perbedaan rasio LDR antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta masih berkaitan dengan keistimewaan BPR Milik Pemerintah Daerah dalam memperoleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh, maka semakin tinggi pula dana yang dihimpun oleh bank yang turut meningkatkan *Cash Ratio* yang dimiliki karena dana yang dihimpun bisa menambah akun kas dan setara kas milik bank (Masitoh, 2019). Oleh karena BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki sumber dana pihak ketiga yang lebih besar karena selain bersumber dari nasabah juga bersumber dari dana pemerintah daerah, maka hal ini juga menyebabkan rata-rata rasio CR pada BPR Milik Pemerintah Daerah lebih tinggi dibandingkan BPR Milik Swasta.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Afriyanto et al., 2016) yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio CR.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan terkait perbandingan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, BOPO, LDR, dan CR, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio KPMM, PPAP, NPL, ROA, dan BOPO karena komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga kinerja keuangan BPR lewat berbagai POJK yang diterbitkan yang mendorong BPR tetap memenuhi ketentuan tersebut sehingga kinerja keuangan dari BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta tetap terjaga dengan baik. Selain itu, hal ini juga didorong oleh situasi pandemi Covid-19 yang turut memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan dari BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta tanpa terkecuali. Sehingga kedua BPR tersebut mengalami dampak yang sama dan menyebabkan kinerja keuangannya tidak jauh berbeda.

Terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BPR Milik Pemerintah Daerah dengan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio LDR dan CR Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta, dimana BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki sumber perolehan dana pihak ketiga yang lebih besar karena tidak hanya berasal dari nasabah juga berasal dari pemerintah daerah dibandingkan BPR Milik Swasta yang hanya mengandalkan dana dari nasabah, sehingga hal ini menyebabkan perbedaan hasil pada rasio LDR dan CR.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang mampu peneliti berikan antara lain, Pertama, bagi BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta hendaknya terus melakukan peningkatan kinerja keuangan dan tidak hanya puas dengan pencapaian yang sudah di dapat, terutama lebih selektif dalam hal penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) untuk menjaga rasio NPL dalam kondisi yang sehat.

Kedua, bagi Pemerintah Daerah hendaknya mengoptimalkan pengelolannya pada sektor perbankan khususnya BPR Milik Pemerintah Daerah mengingat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki kinerja yang lebih baik untuk melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan layanan perbankan.

Ketiga, Bagi masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, maka jika di daerahnya memiliki BPR Milik Pemerintah Daerah dan BPR Milik Swasta, hendaknya memilih mempercayakan dananya pada BPR Milik Pemerintah Daerah karena memiliki rata-rata kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan BPR Milik Swasta.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian agar sampel yang digunakan dapat merepresentasikan populasi dengan lebih baik sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, Kamaliah, & Zulbahridar. 2016. Kinerja Finansial Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Milik Swasta Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 5(1), 11–24. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1130>
- Cornett, M. M., Adair, T. A., & Nofsinger, J. R. (2012). *Finance : applications & theory*. McGraw-Hill/Irwin.
- Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas Dan Penilaian Pasar Terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 109–132. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9988>
- Faroza, T. O., & Susanti, D. 2021. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *EcoGen*, 4(3), 445–455.
- Masitoh, D. 2019. *PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, EFISIENSI OPERASIONAL (BOPO), PEMBIAYAAN, DAN INFLASI TERHADAP CASH RATIO PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI*, Tbk. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Mointi, R. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta. *AkMen*, 16(1).
- Prananta, W., Yulianti, Y., & Damajanti, A. 2019. Analisis Komparasi Kinerja Keuangan BPR

- Milik Swasta Dan BPR Milik Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 57. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.57-73>
- Priatna, H. 2016. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang Wajib Dibentuk oleh Bank. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 9–14.
- Riyadi, S. 2004. *Banking Asset and Liability Management*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rositasari, I. 2016. Analisis Perbedaan Kinerja Antara Bank Milik Pemerintah Dengan Bank Milik Swasta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 4(2), 1–13.
- Sukamulya, S. 2017. *Pengantar Pemodelan Keuangan dan Analisis Pasar Modal*. ANDI.
- Tiarso, E. N., & Idayati, F. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta Menggunakan Metode CAMEL. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5).
- Usmadi. 2020. Pengujian Persyaratan Analisis (Uji Homogenitas dan Uji Normalitas). *Inovasi Pendidikan*, 7(1), 50–62.
- Wanma, J. R., & Anggarini, G. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *JUMABIS: Jurnal Manajemen & Bisnis*, 3, 46–66.
- Widiarto, W., & Jamli, A. 2006. *Perbandingan kinerja keuangan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) dengan BPR swasta :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas*.
- Widiyaningsih, V. A., & Suwasono, H. 2020. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dengan Bank Umum Swasta Nasional: Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2017-2019. *Media Akuntansi*, 32(02), 116–133. <https://www.jurnal.stiepignatelli.ac.id/index.php/mak/article/view/104>
- Yuniarti, S. 2011. Strategi Adaptif Bank Perkreditan rakyat Menghadapi Ekspansi Kredit UMKM Bank Umum di Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 437–445.